

## Peran Pondok Pesantren Nihayatul Amal dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Demi Terciptanya Budaya Politik Pancasila

Aris Riswandi Sanusi<sup>1</sup>, Yudi Firmansyah<sup>2</sup>

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Pos-el: arissanusi@ubpkarawang.ac.id, yudifirmansyah@ubpkarawang.ac.id

### Abstrak

Pendidikan merupakan elemen penting kehidupan bangsa agar mampu menciptakan manusia Indonesia yang hidup berdasar pada sistem nilai yang berlaku yaitu Pancasila. Dalam sudut pandang politik, unsur pendidikan yang berperan penting adalah pendidikan politik yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraan berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi terciptanya budaya politik Pancasila. Pendidikan politik menjadi agenda kepentingan setiap golongan sehingga menimbulkan faksi-faksi politik yang justru tidak sesuai dengan cita-cita negara. Banyak ditemui perilaku menyimpang ini justru dilakukan oleh orang-orang yang paham terhadap agama dan lulusan dari pondok pesantren. Hal ini mendorong untuk melakukan penelitian terkait penyelenggaraan pendidikan politik yang langsung ataupun tidak dilakukan oleh pondok pesantren sehingga dapat menciptakan pemahaman politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai yang dipegang bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pondok pesantren Nihayatul Amal dalam menyelenggarakan pendidikan politik, bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan politik, dan peran kepemimpinan pimpinan pondok pesantren. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu studi deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Nihayatul Amal dengan objek penelitian pengurus pondok pesantren dan beberapa santri yang memiliki kapasitas untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi literatur dengan teknik pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pendidikan politik, pendidikan Islam, dan sebagai bahan pengembangan keilmuan pendidikan politik.

**Kata kunci :** Pendidikan Politik, Pondok Pesantren, dan Budaya Politik Pancasila

### Abstract

*Education is an essential element of the nation to be able to create a living human Indonesia based on the prevailing value system is Pancasila. In view of the political, educational element that is important is the political education that aims to create citizens capable of participating in nationality life based on the values of Pancasila for the creation of a political culture. Political education on the agenda of the interests of each group, giving rise to political factions that did not comply with the ideals of the nation. Many kinds of deviant behavior is actually done by people who know about religion and graduated from boarding school. It is encouraging for researching related to the implementation of political education that directly or indirectly performed by a boarding school so as to create a political understanding based on the values of Pancasila as the nation's value system are held by Indonesia. This study aimed to describe the role of the role of pondok pesantren Nihayatul Amal in organizing political education, forms of organization of political education, and leadership roles pesantren leaders. The approach in this study used a qualitative approach with the method used is descriptive studies. The experiment was conducted at boarding Nihayatul Amal with caretaker research object boarding school and several students who have the capacity to provide answers to the problems of this research. Data collection techniques are interview, observation, document study, and the study of literature with data processing techniques of data reduction, data presentation, and conclusion and verification. The results of this study are expected to provide enlightenment to the public related to political education, Islamic education, and as a matter of scientific development political education.*

**Keywords:** Political Education, Boarding Schools, and the Political Culture of Pancasila

### Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu bagian utuh dari konstalasi politik dunia. Hal ini memungkinkan pengaruh politik dunia akan sangat dirasakan secara masif oleh bangsa Indonesia. Globalisasi sebagai salah satu produk politik internasional merupakan contoh nyata yang saat ini dirasakan bangsa Indonesia dan memberikan dampak yang sangat masif bagi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dapat dicontoh-

kan dampak globalisasi ini terhadap IPTEK, perilaku bangsa, dan bahkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dalam sudut pandang politik, sistem nilai yang menjadi acuan bagi dinamika politik Indonesia diyakini mengalami kemunduran dan bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Hal ini tidak lain adalah dampak yang dihasilkan dari konstalasi politik internasional yang justru tidak selaras dengan

sistem nilai bangsa Indonesia. Contoh nyata penyimpangan yang nampak dalam kehidupan politik Indonesia adalah korupsi dan terorisme. Korupsi menjadi fakta yang selama ini menghantui kehidupan politik Indonesia. Begitu pula terorisme akhir-akhir ini menjadi fokus kajian utama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Korupsi dan terorisme merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari budaya politik Indonesia sekarang ini bahkan dapat dikatakan bahwa kedua fenomena tersebut merupakan produk politik Indonesia dan politik internasional.

Pendidikan menjadi kunci utama bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi penyimpangan tersebut. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam peraturan tersebut nampak jelas bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan bangsa Indonesia yang sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Perlu adanya suatu kejian khusus dalam bidang pendidikan demi mencegah dan menanggulangi fenomena korupsi dan terorisme di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pondok pesantren juga memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi fenomena korupsi dan terorisme tersebut. Fenomena korupsi dari beberapa politisi yang aktif dalam partai politik berhaluan Islam menjadi permasalahan tersendiri yang harus dibenahi oleh pondok pesantren, karena tidak menutup pula beberapa diantaranya adalah jebolan dari pondok pesantren. Begitu pula stigma yang terus menyudutkan pesantren terkait terorisme sehingga banyak stigma negatif terhadap pesantren sebagai penghasil teroris. Kedua permasalahan ini menjadi suatu pukulan besar bagi pendidikan Islam yang dianggap tidak selaras dengan pendidikan nasional yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi salah satu usulan yang tepat bagi pondok pesantren sehingga mampu menciptakan pemuda atau dalam dunia pesantren disebut santri menjadi partisipan yang bertanggung jawab terhadap dinamika kehidupan negara Indonesia. Hal ini seperti diungkap Kartono (2009, hlm. 64) bahwa pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

Jelas nampak bahwa pendidikan politik memberikan peran yang tepat sebagai salah satu solusi dalam menghadapi permasalahan korupsi dan terorisme agar mampu menciptakan pemuda yang mampu berperan dalam masyarakatnya mengingat peran pemuda seperti yang dimuat dalam UU RI No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 16 yang berbunyi "pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional". Serta karakteristik pemuda seperti pada UU RI No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 6 yaitu "memiliki semangat kejujuran, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik". Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan politik yang secara langsung ataupun tidak berjalan dalam pendidikan Islam di pesantren. Tidak lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menghasilkan pemuda sebagai partisipan yang bertanggung jawab terhadap perannya dalam kehidupan kenegaraan dan menghapus stigma negatif terhadap pendidikan Islam.

## Metode

Pendekatan dan metode penelitian merupakan jalan penting dalam suatu penelitian. Pendekatan dan penelitian menjadi langkah awal yang harus ditentukan sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan. Penentuan pendekatan dan metode penelitian membuka jalan selanjutnya langkah yang harus dilakukan dalam penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sugiyono (2010:8) mengatakan bahwa penelitian kualitatif disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Peneliti mengambil pendekatan ini berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pendidikan politik yang dilaksanakan Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Tarbiyatulwildan Nihayatul Amal, sehingga melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat mengkaji dan memperoleh gambaran yang mendalam.

Penelitian kualitatif memiliki sifat terbuka dan mendalam dalam pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini memberikan peluang untuk mencari data secara mendalam dari para informan. Hal ini yang mendasari pengambilan pendekatan kualitatif ini yang dirasakan oleh peneliti bahwa fokus penelitian ini membutuhkan informasi yang mendalam sehingga mampu menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan. Peran peneliti dalam pendekatan ini sangat vital karena terlibat langsung dan penuh dalam penelitian ini dari mulai pengumpulan data, analisis data, dan validasi data sehingga peneliti memahami langsung terkait fokus penelitian dengan data la-

pangan yang memudahkan dalam pembuatan laporan akhir.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dimaksudkan untuk menggambarkan proses penyelenggaraan pendidikan politik. Dalam penelitian ini, peneliti menekankan untuk mengetahui gambaran dari permasalahan yang terjadi secara mendalam. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2009, hlm. 24) yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif lebih spesifik dengan memusatkan kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antar variabel. Pengambilan metode ini dirasa tepat oleh peneliti mengingat sifat dari fokus penelitian ini sangat kompleks yang memungkinkan ditemui variabel-variabel yang saling berhubungan meskipun di luar fokus penelitian. Namun meskipun seperti itu, penelitian ini dibatasi pada satu fokus permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya.

Spradley dalam Sugiyono (2010, hlm. 215) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal dengan adanya *social situation* yang terdiri dari tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Berdasarkan pandangan tersebut, tempat penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Tarbiyatulwildan Nihayatul Amal Rawamerta Kabupaten Karawang Jawa Barat. Adapun *purposes sampling* merupakan langkah yang dilakukan untuk menentukan pelaku yang akan diteliti. Sugiyono (2010, hlm. 218-219) mendefinisikan *purposes sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penentuan pelaku atau subjek penelitian didasari atas pertimbangan kapasitas dan pengalaman informan agar mampu memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Maka, objek penelitian yang telah ditentukan atas pertimbangan tadi adalah pimpinan pondok pesantren, dua orang pengurus pengurus harian dan tiga orang santri dari tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Validitas penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik penelitian. Adapun analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dengan tahapan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

### **Bentuk-bentuk pelaksanaan program pendidikan politik di Pondok Pesantren Nihayatul Amal**

Warga negara merupakan salah satu unsur utama dalam sebuah negara. Negara sebagai suatu organisasi besar memiliki tujuan kehidupan yang akan selalu diusahakan untuk dicapai. Mengingat pentingnya usaha pencapaian tersebut, maka peran warga negara

menjadi sangat penting karena kehidupan sebuah negara sangat bergantung pada warga negaranya. Oleh karena itu, warga negara sebagai motor penggerak roda kehidupan negara dituntut untuk mau dan mampu terlibat secara aktif dalam segala aspek kehidupan kenegaraan.

Begitu pula Indonesia sebagai sebuah negara menuntut peran aktif warga negara sebagai aktor utama untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan kehidupan bernegara. Pemahaman politik adalah modal utama yang harus dimiliki warga negara agar mampu berperan sebagai aktor utama tersebut sehingga untuk menciptakan warga negara yang melek politik diperlukan suatu proses pendidikan bagi warga negara yaitu melalui pendidikan politik. Hajer dalam buku *political education* dari Robert Brownhill dan Patricia Smart dalam Sadeli, dkk (2009, hlm. 19) berpandangan bahwa pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, sehingga masyarakat mengerti tentang hak politiknya. Begitu pula Kartono (2009, hlm. 64) memberikan pandangan bahwa pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

Santri sebagai sebuah status dalam masyarakat yang merupakan bagian dari warga negara juga memiliki tugas yang penting pula dalam memberikan peran aktifnya bagi Indonesia. Tugas santri sebagai warga negara Indonesia adalah bagaimana menerapkan perilaku yang mampu mencerminkan nilai-nilai Islam sekaligus nilai-nilai Pancasila. Terlebih santri sebagai generasi muda Indonesia dituntut untuk diberikan pemahaman politik pula sehingga mampu menjalankan peran layaknya warga negara Indonesia lainnya. Maka, pendidikan politik menjadi suatu kewajiban yang juga harus diselenggarakan oleh pondok pesantren sebagai sarana untuk membentuk santri melek politik. Suatu pemikiran dangkal jika banyak pandangan terhadap santri yang hanya diharuskan untuk belajar agama namun tidak dibelajarkan bagaimana menerapkan nilai agama dalam kehidupan negara. Terlebih lagi, belakangan ini muncul pandangan negatif terhadap pendidikan pesantren yang justru dikategorikan sebagai biang lahirnya terorisme dan perilaku fanatisme sempit yang berujung pada konflik SARA. Berangkat dari pandangan ini pula bahwa sudah seharusnya pendidikan pesantren menyelenggarakan pendidikan politik yang mampu membentuk karakter kebangsaan pada diri santri, sehingga mampu memerankan peran politiknya yang berdasar pada nilai agama dan nilai kebangsaan yaitu Pancasila serta tidak diarahkan pada perilaku politis radikal yang justru memecah belah Indonesia.

Karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk menuntut santri untuk berperilaku politis yang berdasar pada prinsip *rahmatan lil'alam*. Pendidikan politik menjadi kunci akan terciptanya prinsip tersebut bagi para santri mengingat Islam pun pada dasarnya berbicara toleransi dalam kemajemukan bangsa. Kartono (2009, hlm. 66) menyebutkan pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Pendidikan politik bagi santri merupakan jawaban terhadap pandangan buruk terhadap pesantren agar santri mampu mengelola konflik bukan menyebabkan konflik yang berdasar pada agama. Maka, pendidikan politik menjadi sarana pendidikan diri bagi para santri selaras dengan Kartono (2009, hlm. 65) yang menyebutkan bahwa unsur pendidikan dalam pendidikan politik pada hakekatnya merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri). Jelas nyata bahwa pendidikan politik bukan sebatas menekankan pada aspek pemahaman politik warga negara, namun pendidikan diri adalah bagian dari pendidikan yang menekankan pada sikap warga negara. Kartono (2009, hlm. 66) mengatakan bahwa lebih menekankan pada kemampuan mawas situasinya secara kritis, menentukan sikap yang benar, melatih ketangkasan aksi/berbuat. Maka nampak bahwa pendidikan politik adalah menciptakan warga negara yang memiliki pemahaman dan kesanggupan untuk bertindak dalam kehidupan negara dengan dilandasi tanggung jawab sebagai warga negara. Hal inilah menjadi dasar diperlukannya pendidikan politik dalam dunia pesantren seperti yang dipahami oleh pesantren Almahrusiyah Tarbiyaul Wildan Nihayatul Amal.

Pendidikan politik merupakan langkah yang ditempuh untuk membentuk warga negara dalam hal ini yaitu santri yang mampu menjadi pribadi mandiri sebagai insan politik. Dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya, pendidikan politik tidak menonjol pada arah kecerdasan (intelektual) namun lebih pada kecerdasan moral individu dalam berhubungan dengan individu lain dan masyarakatnya. Hal ini menggambarkan bahwa seseorang yang melek dalam politik atau insan politik akan lebih mudah berbaur dengan masyarakatnya, karena mampu berhubungan dengan penuh tanggung jawab dan sadar akan kedudukannya dalam masyarakat.

Pondok Pesantren ini menyadari bahwa pendidikan politik merupakan bentuk persiapan bagi santri agar mampu menjalankan perannya sebagai warga negara yang baik dalam segala aspek kehidupan kenegaraannya bahkan tidak menutup kemungkinan dalam usaha memenangkan pertarungan politik kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan politik di pondok pesantren juga merupakan warna untuk membentuk santri yang kelak mampu menduduki tampuk kekuasaan dalam pemerintahan. Hal ini dilatarbelakangi atas realitas yang ada bahwa untuk mencapai perubahan dan perbaikan secara masif, diper-

lukan kekuatan sistem yang menuntut untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan ajaran agama yang tidak lain sejalan dengan Pancasila sebagai Ideologi Indonesia. Sejalan dengan komitmen NU tidak lain adalah untuk menjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman yang datang baik bersifat internal maupun eksternal. Ancaman dari dalam muncul atas ketidakadilan yang dirasakan warga negara pada berbagai daerah dan karakteristik bangsa Indonesia yang multikultural dan plural yang cenderung mengarah pada terjadinya konflik horizontal apabila tidak ada sosok yang mampu mengelola konflik tersebut. Begitu pula ancaman yang berasal dari luar seperti pesatnya arus globalisasi yang justru dapat menggerus keutuhan NKRI jika tidak mampu untuk disaring.

Kesadaran tinggi warga negara terhadap hak dan kewajibannya merupakan salah satu indikator terbentuknya *civil society* Indonesia. Hal tersebut disadari penuh oleh pondok pesantren bahwa pendidikan politik dalam sudut pandang politik sehari-hari merupakan upaya untuk menciptakan suasana masyarakat madani Indonesia. Pondok pesantren ini memandang *civil society* Indonesia dapat terwujud jika perilaku bangsa Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai-Islam dan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Demi mencapai *civil society* Indonesia, secara umum pendidikan politik bertujuan seperti tercantum dalam Inpres RI No. 12 tahun 1982 yaitu:

Menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia seutuhnya, yang perwujudannya akan tercermin dalam sejumlah ciri watak dan kepribadiannya sebagai berikut:

1. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara yang terutama diwujudkan melalui keteladanan.
2. Secara sadar taat pada hukum dan Undang-Undang Dasar
3. Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional
4. Berpandangan jauh ke depan serta memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, yang didasarkan pada kemampuan objektif bangsa
5. Secara sadar mendukung sistem kehidupan nasional secara demokratis
6. Aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam usaha
7. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa

8. Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam secara selaras, serasi, dan seimbang
9. Mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945

Instruksi Presiden ini menuntun penyelenggaraan pendidikan politik di pesantren harus mampu membentuk santri yang siap untuk berpartisipasi aktif berdasar pada Pancasila yang pada dasarnya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Pendidikan politik ini seperti diungkap Batawi (2013, hlm. 30) yang mengatakan bahwa pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pandangan ini ditegaskan oleh attaturan hukum negara yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 36/2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik pasal 3 poin c berbunyi berkembangnya karakter bangsa yang selaras budaya dan sejarah bangsa. Penyelenggaraan pendidikan politik di pesantren Almahrusiyah Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal ditujukan agar santri memiliki semangat gotong royong, tanggung jawab, dan kedisiplinan merupakan bentuk substantif pendidikan politik yang berdasarkan pada penguatan karakter kebangsaan pada santri. Hal ini dilatarbelakangi bahwa modal utama bangsa Indonesia adalah semangat gotong royong yang dilandasi tanggung jawab dan disiplin

Realitas dewasa ini membuktikan bahwa pesatnya arus informasi global cenderung memberikan dampak pada pergeseran nilai-nilai kebangsaan sehingga bangsa Indonesia mengalami fenomena terkikisnya jati diri bangsa. Saputro (2015, hlm. 41) menambahkan bahwa hal-hal yang wajib dan substansial seperti konsepsi tentang demokrasi dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pemahaman tentang ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kurang diperhatikan secara optimal.

Stigma yang muncul beberapa tahun ke belakang yang menyatakan bahwa pondok pesantren menjadi salah satu biang atas semua kekacauan bahkan melanda dunia internasional. Hal ini membuat sistem pendidikan di pondok pesantren menjadi tersudutkan. Padahal beberapa pakar justru banyak yang beranggapan terkait efektifitas sistem pendidikan yang diselenggarakan pondok pesantren dan menjadi buah bibir penelitian beberapa waktu ke belakang. Hal ini disadari betul oleh pimpinan dan pengurus pondok pesantren bahwa pendidikan pesantren harus mampu menjawab semua permasalahan tersebut. Alhasil, sistem pendidikan pesantren tidak melulu berbicara hakikat agama namun justru pendidikan

pesantren harus mampu menjadi pelopor pembentuk warga negara yang mampu mandiri dan hidup sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. Pendidikan politik yang diselenggarakan pondok pesantren merupakan upaya membentuk santri yang memiliki pemahaman agama dan politik secara teoritis sekaligus praktis. Brownhill dan Smart (1989, hlm. 104) berpendapat

*we shall use Stradling's proposals for such a curriculum as a checklist for deciding on priorities. He examines the contents of the political curriculum by dividing into three sections: knowledge, skills, and attitudes and procedural values. He further divides knowledge into propositional knowledge, and practical knowledge and understanding: skills into intellectual skills, action skills, and communication skills.*

Berdasarkan pendapat tersebut, kurikulum yang harus ada dalam pendidikan politik meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai prosedural. Ketiga bagian tersebut harus ada dalam pelaksanaan pendidikan politik. Pengetahuan sangat diperlukan sebagai landasan pemahaman untuk bertindak politik. Pengetahuan ini lebih bersifat teoritis, sedangkan keterampilan lebih bersifat aplikatif yaitu penerapan dari pengetahuan politiknya dalam kehidupan. Perlu adanya suatu nilai prosedural untuk dijadikan acuan dan batasan dalam melaksanakan tindakan politiknya.

Pada ketiga bagian tersebut, terlihat bahwa dalam pendidikan politik bukan hanya ditekankan dalam hal pemahaman politik warga negara yang bersifat teoritis saja, namun juga perlu adanya suatu aksi atau tindakan politik dari warga negara setelah memiliki pemahaman politik tersebut. Hal ini didasari bahwa pendidikan politik bukan hanya menjadikan manusia yang pintar politik secara intelektual saja, namun seperti diungkapkan Kartono (2009, hlm. 66) bahwa pendidikan lebih menekankan pada kemampuan mawas situasinya secara kritis, menentukan sikap yang benar, melatih ketangkasan aksi/berbuat.

Sebagai langkah realisasi dalam membentuk santri yang memiliki pemahaman secara teoritis dan praktis, maka pondok pesantren menyusun program-program sedemikian rupa sehingga mampu terlaksana secara efektif dan memberi hasil yang positif. Adapun program-program pendidikan politik yang diselenggarakan adalah pemahaman dalam berorganisasi di tingkat pondok pesantren yaitu Rois dan Roisah agar santri memahami pentingnya hidup dalam suatu sistem. Selain mampu memahami bagaimana membuat suatu kebijakan yang mampu efektif bagi masyarakat pondok pesantren. Selain itu, pengajaran-pengajaran yang rutin dilaksanakan selalu disisipkan nilai-nilai budaya dan perjuangan bangsa Indonesia. Karena pondok pesantren memandang bahwa Pancasila merupakan ideologi yang berlandaskan pada syariat Islam dengan menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila.

Kedisiplinan menjadi tujuan lainnya dalam pendidikan pesantren. *Tajir* atau hukuman menjadi salah satu metode agar mampu memupuk kesadaran kedisiplinan para santri. Hal ini terlihat dalam penjadwalan pengajian, shalat berjamaah, dan setoran hapalan. Setiap santri yang melanggar aturan setidaknya dalam ketiga kegiatan tersebut akan dikenakan sanksi berupa *tajir* yang dilakukan setiap minggunya atau bahkan langsung ditempatkan berbarengan dengan waktu pelanggaran. Hal tersebut ditujukan agar santri disiapkan menjadi warga negara yang memiliki tingkat kedisiplinan dalam menjalankan perannya di masyarakat. Metode pembelajaran seperti merupakan salah satu bentuk pendidikan politik, karena pendidikan politik pada dasarnya adalah pembelajaran diri, bagaimana warga negara mampu menjadi aktor yang mampu menjalankan peran dalam masyarakat.

Selanjutnya, Brownhill dan Smart (1989, hlm. 110-111) menyebutkan kurikulum pendidikan politik yaitu sebagai berikut.

- a. *An ethical based should be developed, which would include respect for others, tolerance, and an understanding of the principle of treating others as one would like to be treated oneself.*
- b. *A consideration of how rules can be changed, and generally of how to get things done.*
- c. *Nature of rules and authority.*
- d. *Concept of obligation to legitimate authority.*
- e. *An understanding of some basic political concepts, e.g. freedom, equality, justice, the rule of law, and some of the arguments related o these concepts.*
- f. *An understanding of tthe basic structure of central and local government.*
- g. *Some understanding of the working of the national and international economy.*
- h. *Some knowledge of recent British and international history.*
- i. *Self-analysis.*

Kurikulum pendidikan politik ini mengisyaratkan bahwa pendidikan politik menitik beratkan pada kemampuan mawas diri untuk berperilaku secara etis dalam menjalankan kehidupan kenegaraan. Santri sebagai generasi muda yang dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan bangsa dirasakan wajib untuk mendapatkan pendidikan politik. Mengingat sejarah santri yang pernah berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia, sudah saatnya santri kembali menemukan karakter kebangsaannya seperti yang pernah tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia.

### **Peran kepemimpinan pimpinan pondok pesantren dalam membentuk kesadaran politik santri**

Kepemimpinan merupakan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain sehingga dapat bertindak sesuai dengan koridor yang telah ditentukan bersama. Kepemimpinan (*leadership*) menjadi kunci utama dalam sebuah budaya organisasi. Sosok pemimpin merupakan sosok yang diharapkan mampu menjadi pengatur dinamika organisasi yang terdiri atas anggota yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin wajib memiliki karakter kepemimpinan agar mampu menjalankan perannya dalam suatu organisasi baik dala arti sempit maupun arti luas.

Dalam dunia pendidikan pesantren, kepemimpinan pimpinan pondok pesantren menjadi nilai utama dalam sistem komando pendidikan. Kyai memiliki peran penting sebagai sosok teladan bagi setiap santri. Dalam mendefinisikan kepemimpinan, Koontz dan O'donnel (Rivai, dkk., 2014, hlm. 3) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Pendefinisian ini memberikan penegasan bahwa kepemimpinan sebagai karakter yang harus dimiliki setiap pemimpin untuk menciptakan suasana organisasi yang berjalan dinamis demi satu tujuan yang telah ditentukan organisasi. Dalam proses memengaruhi, pemimpin harus memberikan contoh dan mampu menjadi motivator terhadap anggota organisasi sehingga menjadi stimulus bagi kinerja anggotanya.

Menurut ajaran Islam, kepemimpinan memiliki tempat khusus karena menjadi kunci utama penggerak umat. Allah sangat menyukai umat Nya yang mampu berjalan rapi dan selaras sesuai dengan apa yang telah diperintah Nya. Dari hal tersebut, Allah memerintahkan umat Nya untuk memiliki pemimpin yang mampu menjadi perantara demi mengarahkan umatnya pada tujuan Ilahi. Pemimpin memiliki tugas yang sangat berat yaitu harus mampu membawa anggota organisasinya menjadi lebih bergairah dalam menjalankan dinamika organisasi sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan. Bukan hanya sebagai seorang pendorong, namun pemimpin harus mampu menjadi panutan atau teladan bagi para anggotanya. Adapun karakter kepemimpinan menjadi pegangan yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya seorang pemimpin, organisasi bagaikan kapal laut tanpa nahkoda yang mampu berlayar menuju dermaga tujuan, sedangkan nahkoda tanpa kemampuan untuk mengendalikan kapalnya niscaya tidak akan pernah mampu melawan arus air dan angin terlebih dalam menghadapi badai. Kiasan tersebut merupakan penegasan tentang pentingnya pemimpin dan kemampuannya dalam memimpin (kepemimpinan).

Begitupun dalam lingkungan pesantren, kepemimpinan kyai sebagai pemimpin pesantren sangat berpengaruh terhadap perilaku santri. Maka, pemimpin pesantren Almahrusiyah Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal berusaha untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang dirasakan ideal bagi kehidupan pesantren terlebih bagi para santri sehingga penerapan gaya kepemimpinan yang tegas dan terbuka menjadi salah satu yang diperankan agar mampu menjadi stimulus bagi para santri agar mau belajar dari kyai tersebut. Pimpinan pesantren memiliki peran sentral dalam membentuk karakter santri sehingga banyak santri yang mampu menjalankan perannya di lingkungan pesantren dan para santri akan melaksanakan semua kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan politik bukan hanya melalui pembelajaran pembiasaan, namun sosok teladan dari seorang pemimpin menjadi nilai utama lainnya dalam membentuk karakter warga negara dalam berpolitik yang sesuai dengan nilai budaya. Suri teladan dari sosok pemimpin yang mampu menunjukkan budaya toleransi atas perbedaan menjadi nilai penting yang dibutuhkan Indonesia. Rahmadi (2016, hlm. 28) mengatakan ... dalam pendidikan politik ..., tidak terlepas juga peran elit masyarakat seperti tokoh agama, elit kemasyarakatan, kepemudaan, dan lain sebagainya yang berperan mewarnai kegiatan pendidikan politik. Pimpinan pesantren memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan politik santri. Teladan pimpinan pesantren menjadi salah satu unsur keberhasilan pelaksanaan pendidikan politik di lingkungan pesantren. Keteladanan pimpinan pesantren yang mencerminkan budaya politik yang berlandaskan nilai agama dan Pancasila juga memberikan pengaruh terkait keberhasilan pendidikan politik. Seperti diungkap Batawi (2013, hlm. 30) yang menyebutkan bahwa pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Peran pimpinan pesantren yang membelajarkan pemahaman Pancasila kepada santri memberikan dorongan untuk membentuk situasi politik yang mencerminkan pluralistik seperti yang terkandung dalam Pancasila. Maliki (2010, hlm. 179) mengatakan kondisi yang diyakini bisa memperkuat budaya politik pluralistik yaitu (1) wawasan kebangsaan yang tidak memataikan pluralisme, (2) budaya multikultural yang kuat, (3) penyelenggara birokrasi pemerintah yang terbuka, (4) generasi yang mewarisi budaya positif untuk pluralisme politik, dan (5) komunitas agama yang toleran dan kohesif.

Penyelenggaraan Pendidikan politik dalam usaha membentuk santri yang memiliki pemahaman ke-Indonesia-an ini dilakukan oleh pimpinan pesantren melalui pengajian yang selalu disisipi wawasan kebangsaan Indonesia yang ditujukan agar para santri

secara terus menerus diperkenalkan pada Indonesia dan Pancasila. Hal tersebut merupakan modal utama bagi para santri agar kelak setelah lulus dari pesantren menjadi aktor dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan pada nilai-nilai moral agama dan ideologi bangsa. Hal ini tidak lepas dari fungsi ideologi seperti diungkap Poespo-wardojo (1991, hlm. 48) yaitu memberikan:

- 1) Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
- 2) Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- 3) Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- 4) Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
- 5) Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- 6) Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Pancasila sebagai Ideologi merupakan pegangan hidup bagi bangsa Indonesia agar kehidupan bangsa berdasar pada norma-norma yang melekat pada Pancasila dan pada dasarnya merupakan cerminan budaya luhur bangsa. Pemahaman Pancasila bagi santri ditujukan untuk mencapai *civil society* Indonesia yang dapat dicapai melalui perilaku politik warga negara yang berlandaskan pada Pancasila sehingga pada akhirnya terbentuk budaya politik Pancasila. Gaffar (2000, hlm. 99) mengatakan teori tentang budaya politik merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam memahami sistem politik. Maka, dalam membentuk budaya politik Pancasila haruslah dipahami sistem politik yang berlandaskan Pancasila. Sebagai upaya membentuk suatu sistem politik, langkah awal yang dibangun adalah perilaku politik masyarakatnya. Hal ini disadari pondok pesantren bahwa pendidikan politik diselenggarakan untuk membentuk santri yang mampu mencerminkan perilaku politik yang berlandaskan Pancasila. Kuswandi (2010, hlm. 40) menyebutkan perilaku politik lebih mengarah pada tindakan-tindakan yang disebabkan cara pandang individu atas sistem politik yang dilaksanakan dalam aktivitas berpolitik dia. Sedangkan budaya politik lebih berkonotasi pada pelembagaan dari perilaku politik warga negara yang telah menyatu dalam aktivitas sosial dan politik. Namun, penerapan

budaya politik Pancasila dihadapkan pada kenyataan bangsa Indonesia seperti diungkap Kantaprawira (1985, hlm. 40-44) yang menyebutkan konstalasi sementara tentang budaya politik Indonesia sebagai berikut.

- 1) Konfigurasi subkultur di Indonesia yang masih aneka ragam.
- 2) Budaya politik Indonesia yang bersifat parokial kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak.
- 3) Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar.
- 4) Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme dan sifat patrimonial.
- 5) Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, menyikapi kenyataan seperti ini yang diperlukan bangsa Indonesia adalah menggalakkan penyelenggaraan pendidikan politik yang merata bagi seluruh anak bangsa diantaranya santri. Kembali menjadi titik penekanan, dalam hal ini peran pimpinan pondok pesantren harus mampu memahami perilaku kepemimpinannya dan situasi yang sedang dihadapi sehingga mampu memberikan menyelenggarakan program pendidikan politik maupun mampu menerapkan perilaku sebagai teladan yang bisa diikuti oleh para santri. Rivai dan Mulyadi (2013, hlm. 9) memberikan penekanan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Karena pada dasarnya, gaya kepemimpinan dari pimpinan pesantren sangat menentukan akan keberhasilan pendidikan politik yang diselenggarakan.

## Kesimpulan

Pendidikan politik merupakan salah satu pembelajaran yang ditujukan kepada santri agar mampu dipersiapkan menjadi warga negara yang bertanggung jawab atas peran dan tindakannya dalam segala aspek kehidupan kenegaraan. Pendidikan politik menjadi salah satu solusi untuk menjawab atas keresahan masyarakat yang banyak menyudutkan pesantren sebagai biang terjadinya aksi teror di Indonesia. Hal ini menjadi dasar pemikiran bahwa santri sebagai generasi penerus estafet kenegaraan harus mampu menjalankan peran dan memberikan kontribusi untuk perkembangan dan kemajuan negara sesuai dengan ajaran agama dan ideologi Pancasila yang tidak lain adalah nilai-nilai dari syariat agama itu sendiri.

Oleh karena itu, pondok pesantren baik secara langsung maupun tidak harus menyelenggarakan

pendidikan politik tersebut. Adapun beberapa bentuk penyelenggaraan pendidikan politik tersebut adalah melalui pengajian yang menyisipkan nilai-nilai ke-Indonesia-an sebagai upaya menanamkan rasa nasionalisme terhadap negara ini. Selain itu, pembelajaran organisasi dalam lingkungan pesantren menjadi modal tersendiri sebagai sarana pembelajaran tentang kehidupan dalam suatu sistem. Hal ini ditujukan untuk mempersiapkan santri yang mampu menjadi aktor dalam pembentukan kebijakan yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai budaya bangsa. Bentuk lainnya yaitu melalui penerapan sanksi untuk menumbuhkan karakter kedisiplinan santri sehingga mampu bertanggung jawab atas waktu dan amanah yang kemudian hari diemban.

Selain itu, sosok kepemimpinan yang disandang oleh pimpinan pesantren memiliki peran penting pula dalam membentuk pemahaman dan tindakan santri. Sosok kyai dalam sistem pendidikan pesantren memiliki nilai utama yaitu sebagai sosok teladan yang harus diikuti agar mampu memberikan manfaat dalam hidup. Segala tingkah laku kyai menjadi acuan bagi para santri agar bisa diteladani mengingat tindakan kyai didasarkan pada kebijaksanaan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi pembelajaran bagi para santri agar mampu hidup sebagai sosok yang mampu menunjukkan kebaikan, kebajikan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Melalui metode-metode pembelajaran pendidikan politik yang diselenggarakan oleh dunia pendidikan pesantren ini, diharapkan mampu memberikan solusi atas kebobrokan nilai yang saat ini terjadi pada warga negara Indonesia, sehingga santri mampu menjadi jawaban akan permasalahan tersebut dengan dipersiapkan sebagai warga negara yang mampu menjalankan perannya secara bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila.

## Daftar Pustaka

- Batawi, J. W. (2013). Tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam pilkada. *Jurnal UNIERA*. 2 (2). Hlm. 26 – 52.
- Brownhiil, R. & Smart, P. (1989). *Political Education*. London and New York: Routledge.
- Gaffar, A. (2000). *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda
- Kantaprawira, R. (1984). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.



- Kuswandi, A. (2010). Membangun gerakan budaya politik dalam sistem politik Indonesia. *Jurnal Governance*. 1 (1). Hlm. 40 – 50.
- Maliki, Z. (2010). *Sosiologi Politik makna kekuasaan dan transformasi politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nasution, S. (2009). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 36/2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Poespowardojo, S. dkk. (1991). *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Rahmadi, D.S. (2016). Peran Elit Politik Lokal dalam Pendidikan Politik Mahasiswa di Kabupaten Lombok Timur. *SOCIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 15 (1). Hlm. 13-32.
- Rivai, V. & Mulyana, D. (2013). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai, V. dkk. (2014). *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadeli, Elly H, dkk. (2009). *Bedah Buku Political Education dari Robert Brownhill dan Patricia Smart*. Bandung: Kencana Utama.
- Saputro, Y. D. (2015). Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politi Generasi Muda dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009-2014). *Jurnal Ketahanan Nasional* 11 (1). Hlm. 34-42.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan